



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Moh Hatta - P A I N A N

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 08 / Kpts / DPP-PS / 2024

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Perikanan dan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 184 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN NOMOR : 800 / 05 /Kpts/DPP-PS/2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPP KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 860 /08 /KPTS/DPP-PS/2024'
TANGGAL : 17 Januari 2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP DPP			A (81)	A(81,5)	A(82)	A(82,5)
2. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan			82	87	88,5	89
3. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan	Produksi Perikanan			49.818	50.694	62.000	62.500
4. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi DPP			100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi	-	-	100%	100%	100%	100%
	2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
	3. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	-	-	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)
2. Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Wilayah Tahan Pangan	-	-	86%	86%	87%	88%
3. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Ketersediaan Energi (%)	-	-	97%	97%	98%	98%
	2. Persentase Ketersediaan Protein (%)	-	-	97%	97%	98%	98%
	3. Persentase Konsumsi Energi(%AKE)	-	-	98,6%	98,8%	99 %	99,2%
	4. Persentase Konsumsi Protein (%AKP)	-	-	95,4%	95,8%	96%	96,5%
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang aktif	-	-	85%	85%	85%	85%
5. Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan			85.885.000.000	86.035.000.000	86.235.000.000	86.485.000.000
	2. Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	-	-	44,86	44,91	44,96	45,01

6. Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			13.913	14.608	15.478	16.106
7. Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			35.906	36.085	46.522	46.647

KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Upaya Pencegahan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	-	1	1	1	1
	Jumlah Nagari Rawan Pangan yang ditangani			2	2	2	2
2. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Registrasi PSAT	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	-	-	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Stock Cadangan Pangan	-	-	40%	56%	63%	72%
5. Meningkatnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan	-	-				
	- Umbi-umbian			1,2%	1,4%	1,5%	1,6%
	- Protein Hewani			10,1%	10,2%	10,3%	10,4%
	- Kacang-kacangan			1,3%	1,4%	1,5%	1,6%
	- Sayur dan buah			5,1%	5,2%	5,3%	5,4%
6. Meningkatkan Pengelolaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang aktif	-	-	20 Kelompok	22 Kelompok	24 Kelompok	26 Kelompok
7. Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	142 Orang	145 Orang	150 Orang	155 Orang
8. Meningkatnya Pengelolaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkatkan pendapatannya	-	-	145 Orang	150 Orang	155 Orang	160 Orang
	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan dalam satu Kabupaten			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
9. Meningkatnya Pengelolaan Pembudidaya Ikan	1. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya yang meningkatkan Pendapatannya	-	-	50 RTP	50 RTP	50 RTP	50 RTP

	2. Jumlah Peningkatan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	-	-	20 Ha	22 Ha	24 Ha	26 Ha
	Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan			100 Kolam	110 Kolam	120 Kolam	140 Kolam
10. Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Budidaya yang meningkat kapasitasnya	-	-	20 Kelompok	25 Kelompok	30 Kelompok	35 Kelompok
11. Meningkatkanya Kapasitas Kelembangaan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi produk kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan	-	-	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
12. Meningkatnya Ragam Produk Hasil Perikanan	Jumlah Peningkatan Ragam Produk Perikanan Berdaya Saing	-	-	15 ragam	18 ragam	22 ragam	27 ragam

II. Penjelasan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Pembangunan sektor Perikanan dan Pangan diperlukan penyamaan persepsi terhadap sasaran Dinas Perikanan dan Pangan, maka setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijelaskan menggunakan definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Dinas Perikanan dan Pangan

2. Skor Pola Pangan Harapan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama
- Formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah skor pph}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100\%$$
- Sumber data : Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS)
- Penanggung jawab : Dinas Perikanan dan Pangan

3. Produksi Perikanan

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota
- Formulasi :

$$\text{Produksi Perikanan Tangkap} + \text{Produksi Perikanan Budidaya}$$
- Sumber data : Dinas Perikanan dan Pangan
- Penanggung jawab : Dinas Perikanan dan Pangan

4. Nilai Kematangan Inovasi

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Dinas Perikanan dan Pangan

5. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
- Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
--
- Sumber data : Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

6. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
- Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
- Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan

7. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran

akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.

- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}}$$
- Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
- Penanggung jawab : Sekretaris Perikanan dan Pangan

8. Persentase Wilayah Tahan Pangan

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Rasio daerah tahan pangan terhadap total daerah
- Formulasi :
$$\frac{\text{Nagari Tahan Pangan}}{\text{Jumlah Total Nagari}} \times 100\%$$
- Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

9. Persentase Ketersediaan Energi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Persentase rasio antara ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi dengan jumlah penduduk.
- Formulasi :
$$\text{KSPE} = \frac{\text{ktsp}}{P \times 365 \text{ hari}} \times 100\%$$

KSPE : Ketersediaan energi (Kkal/Kap/hari)
KTSP : Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia(Ton/Tahun)
P : Jumlah Penduduk
- Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

10. Persentase Ketersediaan Energi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Persentase rasio antara ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi dengan jumlah penduduk.
- Formulasi :
$$\text{KSPp} = \frac{\text{kspp}}{P \times 365 \text{ hari}} \times 100\%$$

KSPp : Ketersediaan Protein Pangan (Gr/Kap/hari)
P : Jumlah Penduduk
- Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- Penanggung jawab : Kepala Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

11. Persentase Konsumsi Energi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi dalam satuan %AKG.
Formulasi	:	$\frac{\text{Konsumsi energi}}{\text{Angka kecukupan energi}} \times 100\%$
Sumber data	:	Data susenas BPS Provinsi Sumatera Barat.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

12. Persentase Konsumsi Protein

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Perbandingan antara banyaknya protein yang dikonsumsi terhadap kecukupan energi dalam satuan %AKG.
Formulasi	:	$\frac{\text{Konsumsi protein}}{\text{Angka kecukupan protein}} \times 100\%$
Sumber data	:	Data susenas BPS Provinsi Sumatera Barat.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

13. Persentase Gapoktan Lumbung Pangan yang Aktif

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	persentase antara jumlah lumbung pangan Gapoktan yang aktif terhadap total jumlah.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah gapoktan lumbung pangan}}{\text{Jumlah gapoktan lumbung pangan yang aktif}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

14. Produksi Perikanan Tangkap

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Jumlah produksi perikanan tangkap dalam tahun berjalan.
Formulasi	:	Total Produksi Perikanan Tangkap
Sumber data	:	Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan.

15. Produksi Perikanan Budidaya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Jumlah Produksi Budidaya Kabupaten/Kota
Formulasi	:	Total Produksi Perikanan
Sumber data	:	Bidang Perikanan Budidaya
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

16. Nilai Tambah Hasil Perikanan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	pertambahan nilai Hasil Perikanan yang diperoleh dari perbedaan harga jual dengan biaya bahan-bahan atau pasokan lainnya dari kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, penanganan ikan, pengolahan ikan, dan distribusi dalam suatu proses produksi
Formulasi	:	$\begin{aligned} &(\text{Produksi} \times \text{Harga Olahan}) \\ &- (\text{Produksi} \times \text{harga bahan baku}) \end{aligned}$
Sumber data	:	Dinas Perikanan dan Pangan
Penanggung jawab	:	Dinas Perikanan dan Pangan

17. Jumlah Peta ketahanan dan kerentanan pangan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah Dokumen Peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun
Formulasi	:	Total peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun
Sumber data	:	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

18. Jumlah Nagari Rawan Pangan yang ditangani

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah Nagari Rawan Pangan berdasarkan Peta ketahanan dan kerentanan pangan yang ditangani
Formulasi	:	Total nagari tahan pangan yang ditangani
Sumber data	:	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

19. Jumlah Registrasi PSAT

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Pelaku Usahan yang ditebitkan
Formulasi	:	Total Registrasi PSAT
Sumber data	:	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

20. Jumlah Ketersediaan Pangan Utama

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah ketersediaan pangan utama berupa beras konsumsi per kapita per tahun
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan Beras}}{\text{Jumlah Penduduk}}$

Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

21. Jumlah Ketersediaan Stok Cadangan Pangan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jmlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah
Formulasi : Total ketersediaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

22. Persentase Keragaman Konsumsi Pangan Per Kelompok Pangan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Persentase kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi
Formulasi : $\frac{\text{Konsumsi Kelompok Pangan}}{\text{AKG Kelompok Pangan}} \times 100\%$
Sumber data : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

23. Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang aktif

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang Aktif
Formulasi : Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang Aktif
Sumber data : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

24. Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil melalui pemberdayaan, pendidikan dan akses terhadap sumberdaya pendukung aktivitas penangkapan ikan.
Formulasi : Jumlah Nelayan yang mengikuti pengembangan kapasitasnya
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

25. Jumlah Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Peningkatan rumah tangga nelayan kecil yang meningkat pendapatannya

Formulasi : Jumlah rumah tangga nelayan yang mendapatkan bantuan
Sumber data : Bidang Pemberdayaan Nelayan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan

26. Jumlah Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Pembudidaya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Peningkatan rumah tangga pembudidaya yang meningkat pendapatannya
Formulasi : Jumlah rumah tangga pembudidaya yang menerima bantuan hibah
Sumber data : Bidang Budidaya Perikanan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Budidaya Perikanan

27. Jumlah Peningkatan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah lahan budidaya dalam satu kabupaten/kota
Formulasi : Luasan Lahan budidaya
Sumber data : Bidang Budidaya Perikanan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Budidaya Perikanan

28. Jumlah Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Pengujian kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya yang diuji
Formulasi : Jumlah pengujian kesehatan ikan dan lingkungan
Sumber data : Bidang Budidaya Perikanan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Budidaya Perikanan

29. Jumlah Poklahsar yang Meningkatkan Kapasitasnya

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Hasil Perikanan
Formulasi : Total Poklahsar yang mengikuti pengembangan kapasitas
Sumber data : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

30. Jumlah Rekomendasi Produk Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Jumlah Rekomendasi Produk Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diterbitkan dalam rangka sertifikasi kelayakan produk hasil perikanan
Formulasi : Total Rekomendasi Sertifikat SKP
Sumber data : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

31. Laju Peningkatan Ragam Produk Perikanan Berdaya Saing

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Jumlah ragam produk perikanan yang dihasilkan

Formulasi : Jumlah Ragam Produk yang dihasilkan per tahun

Sumber data : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penanggung jawab : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

KEPALA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006